

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru, nama Covid-19 memiliki kepanjangan dari ‘CO’ dari corona, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit). Selain itu penyakit ini sebelumnya disebut sebagai ‘2019 novel coronavirus’ atau ‘2019-nCoV.’ Virus Covid-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa¹. Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei, China². Sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia, mengakibatkan dampak pandemi secara global 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.

¹ WHO. *Coronavirus*. Diakses dari < https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1> pada tanggal 16 April 2022.

² Adityo Susilo. *Coronavirus disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini dalam Jurnal Penyakit Dalam Universitas Indonesia Vol 7, No. 1* [daring]. Diakses dari <<http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>> pada tanggal 16 April 2022.

Saat ini, virus Covid-19 telah menjadi masalah kesehatan global berdampak besar pada semua bidang kehidupan di seluruh dunia, mulai dari ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, hingga pariwisata. Hal ini karena virus Covid-19 menciptakan ketakutan akan bahaya dan risiko yang berpotensi fatal berdasarkan berita dan fakta terkini. Akibatnya, masyarakat khawatir melakukan segala aktivitas yang berpotensi terjangkit virus Covid-19. Kerusakan ekonomi akibat Covid-19 menyebabkan hilangnya aktivitas ekonomi.

Sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak dari menyebarnya virus Covid-19³. Dikarenakan banyak negara yang menerapkan *lockdown*, sehingga objek wisata tersebut berhenti beroperasi. Hal ini dilakukan karena banyak negara yang membatalkan semua visa yang dikeluarkan. Selain itu juga banyak wisatawan yang membatalkan perjalanannya karena masih khawatir dengan kondisi ini. Sebanyak 93% destinasi pariwisata di Eropa tutup operasionalnya, sedangkan di Amerika proporsinya mencapai 82%, di Asia dan Pasifik 77%, di Timur Tengah 70% dan Afrika 60%⁴. Industri pariwisata yang awalnya tumbuh sangat pesat, kini tampak lemah dan mengalami penurunan yang sangat dramatis.

³ Suluh Sugeng Wicaksono. *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Hotel Syariah Di Yogyakarta (Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta)* Diakses dari <<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/29177/13423010%20Suluh%20Sugeng%20Wicaksono.pdf?sequence=1>> pada tanggal 16 April 2022.

⁴ Tri Haryanto. *Editorial: Covid-19 Pandemic and International Tourism Demand dalam Journal of Developing Economies, Vol. 5.*

Penurunan yang terjadi di sektor pariwisata selama ini tidak dapat diatasi hingga kasus wabah virus Covid-19 ini menemukan titik terang solusinya. Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Negara baik sebagai salah satu sumber penghasil devisa maupun sebagai pencipta lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) yang berbasis di Madrid mengatakan, ada kecenderungan menuju pendekatan yang lebih bernuansa, bukti dan berbasis risiko untuk pembatasan perjalanan, seperti mewajibkan wisatawan internasional untuk memberikan bukti tes negatif pada saat kedatangan. Kedatangan turis internasional turun 1 miliar atau 74%, pada tahun 2020, menurut UNWTO, yang menyebutnya sebagai tahun terburuk dalam sejarah pariwisata.

Didapatkan data dari *Johns Hopkins Coronavirus Resource Center*, bahwa wabah penyakit ini sudah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia saat itu menduduki peringkat ke-21. Dengan jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 hampir mencapai 500 ribu jiwa. Dalam hal ini. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu elemen yang paling berperan telah menempuh berbagai cara untuk mempercepat penanganan kasus Covid-19. Pada awal penyebarannya, pemerintah mulai memperketat pintu masuk ke Indonesia di banyak titik seperti bandara dan pelabuhan serta mendirikan fasilitas kesehatan. Namun, Indonesia masih dinilai lemah dalam pengujian tes Covid-19, bahkan bisa dikatakan terendah di dunia.

Berdasarkan data statistik *with meters* per 8 April 2020, Indonesia baru menguji 14.354 WNI (Warga Negara Indonesia). Data menunjukkan hanya 52 orang yang

menjalani tes Corona dari setiap 1 juta warga negara Indonesia. Jumlah ini tentu sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus Covid-19 dinilai belum cukup baik, terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif penderita Covid-19 dan jumlah kematian.

Pemerintah dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan penyelidikan dan pelayanan penjemputan bagi korban, orang yang terpapar atau orang yang memiliki gejala infeksi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus semakin meluas dan tidak terkontrol. Tidak hanya itu, upaya *lockdown* menjadi cara alternatif yang bisa ditempuh. Namun, pemerintah enggan mengambil langkah ini karena *lockdown* merupakan alternatif yang bisa dikatakan ekstrim. Pemerintah menilai masih ada alternatif rasional lain yang bisa diambil.

Lockdown bukan hanya menutup penyebaran, tapi semua bidang kehidupan ditutup, sehingga *lockdown* dianggap bukan pilihan terbaik yang bisa dilakukan pemerintah. Bagi pemerintah, hal penting yang harus dilakukan dalam pencegahan Covid-19 adalah menghindari kontak dekat atau langsung dengan orang lain (*social distancing*), menghindari keramaian, mengurangi jumlah orang di tempat atau fasilitas umum. Atas dasar itu, cara yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai daerah. Daerah-daerah yang dimaksud yaitu daerah yang memiliki potensi penyebaran paling besar atau yang menjadi daerah penyebaran seperti zona merah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka penanganan wabah⁵. Dalam praktiknya, PSBB sendiri banyak menekankan pada pembatasan berbagai aktivitas masyarakat. Saat ini, pemerintah tidak menggunakan istilah Pembatasan Sosial Massal (PSBB), tetapi telah diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri. Kebijakan PPKM mulai berlaku pada tanggal 11-25 Januari 2021 seiring dengan penguatan protokol kesehatan di beberapa wilayah Jawa Bali yaitu DIY, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Kebijakan PPKM bukanlah larangan kegiatan masyarakat dan tidak menghentikan semua kegiatan. Semua kegiatan sektor utama Jawa dan Bali masih berlangsung, termasuk makanan, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, dan layanan dasar. Kebijakan PPKM lebih dipilih pemerintah dibandingkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya kearifan daerah dengan memberikan konsesi kepada usaha kecil menengah terutama di daerah atau wilayah yang diduga terkontaminasi Covid-19 seperti di Bali, Indonesia.

⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-413-2020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_COVID-19.pdf> pada tanggal 16 April 2022.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada desember 2019 (sebelum Covid-19 menyebar ke Indonesia) yaitu mencapai 1,38 juta kunjungan⁶. Dengan kategori tertinggi jumlah kunjungan wisatawan yang datang melalui pintu masuk laut di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali dengan persentase kenaikan tertinggi sebesar 141,57 persen dari total 388,50 ribu kunjungan. Selain itu, Bali juga menduduki peringkat pertama rata-rata lama tamu asing menginap yaitu 2,75 hari. Untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara, Bandara Ngurai Rai pada Desember 2018 mencapai 495,641 kunjungan dan pada desember 2019 sebanyak 838,978 kunjungan. Jika dibandingkan dengan Lombok yang juga merupakan destinasi wisata di Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk udara di Bandara Int. Lombok pada Desember 2018 sebanyak 3,151. Pada desember 2019, Lombok mengalami kenaikan sebesar 5,499.

Akibat Covid-19, Bali merupakan salah satu destinasi yang paling terkena dampak penurunan jumlah kunjungan wisatawan, karena sektor pariwisata merupakan tulang punggung pendapatan masyarakat setempat⁷. Wisatawan asing merupakan sumber pendapatan terbesar dari pulau dewata. Selain itu, wisatawan dari China menjadi penyumbang terbesar. Menurut Biro Imigrasi Bali, sebanyak 392.824 wisatawan

⁶ Badan Pusat Statistik. *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Desember 2019 mencapai 1,38 juta kunjungan*. Diakses dari < <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/1711/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2019-mencapai-1-38-juta-kunjungan-.html> > pada tanggal 26 April 2022.

⁷ Asma Saleh. *Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Tingkat Hunian Hotel (Studi Kasus di Hotel Svarga Kabupaten Lombok Barat)*. Diakses dari < <http://repository.ummat.ac.id/2134/4/COVER-BAB%20III.pdf> > pada tanggal 16 April 2022.

berkunjung ke Bali pada Februari 2020, dan virus Covid-19 telah menurunkan angka tersebut sebesar 33% dari Januari.

Bali tercatat telah menutup semua fasilitas wisata dan rekreasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Keputusan tersebut diambil berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Bali per 20 Maret 2020. Delapan pemerintah kabupaten atau kota di Bali sudah menutup destinasi wisata mulai tanggal 18 Maret 2020. Larangan bepergian bagi warga dari seluruh dunia juga menurunkan sektor pariwisata di Bali. Tahun lalu, sekitar 2 juta wisatawan asal China berkunjung ke Bali, namun pada Februari 2020 hanya sekitar 4000 wisatawan. Biasanya pada awal Januari 2020 hingga Februari 2020 merupakan musim liburan bagi wisatawan asal China yang berkunjung ke Indonesia.

Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, memprediksi bahwa virus Covid-19 akan merugikan pariwisata Indonesia sekitar Rp 54,6 triliun⁸. Perkiraan tersebut hanya didasarkan pada kedatangan hingga 2 juta wisatawan asal China setiap tahun. Apa yang terjadi dalam pariwisata di Bali memberikan gambaran besar di tingkat nasional. Gambaran besar yang dimaksud seperti pantai terlihat sepi pengunjung, dan hanya pengelola bisnis yang duduk santai di tepi pantai. Beberapa kapal pesiar telah memutuskan untuk tidak berlabuh di Bali.

⁸ CNN. *Wishnutama Taksir Virus Corona Rugikan Pariwisata RI Rp.54,6 T*. Diakses dari < <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200207160645-92-472662/wishnutama-taksir-virus-corona-rugikan-pariwisata-ri-rp546-t> > pada tanggal 16 April 2022.

Selain itu, penyebaran virus Covid-19 telah mengurangi jumlah penghuni hotel di Bali hingga mencapai angka 70%. Kondisi ini sangat disayangkan terkait potensi Bali sebagai destinasi wisata andalan di Indonesia. Maka dari itu, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia memilih Provinsi Bali sebagai tempat destinasi wisata pertama yang dibuka kembali untuk mancanegara di Indonesia. Dalam melakukan persiapan-persiapan untuk reaktivasi pariwisata di Bali, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Salah satu upaya untuk menangani permasalahan ini yaitu dengan dilakukannya kerjasama internasional. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengembalikan seperti semula sektor pariwisata.

Menurut James J. Spillane bahwa secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik⁹. Dalam masa pandemi ini, negara-negara di dunia mulai melakukan hubungan kerja sama terkait sektor pariwisata. Hubungan kerja sama tersebut kini sudah semakin berkembang baik dalam lingkup regional maupun internasional dalam upaya mengembalikan kondisi pariwisata seperti semula.

⁹ Spillane, James J. *Pariwisata Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1987)

Maka peranan pemerintah Indonesia dan organisasi internasional sangat dibutuhkan. Dengan adanya kerja sama kedua belah pihak diharapkan dapat reaktivasi dan menghidupkan kembali perekonomian dalam sektor pariwisata di Indonesia. Organisasi internasional yang mempunyai peran besar dalam memberikan kontribusi pada masalah ini adalah *United Nations World Tourism Organization* atau dapat disingkat dengan UNWTO.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) merupakan organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menangani pariwisata dunia. Bagi UNWTO pentingnya perkembangan pariwisata ini karena pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional suatu negara. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antar-negara¹⁰. Tanggung jawab UNWTO adalah mengembangkan pariwisata di negara anggotanya, dengan melakukan kerjasama dan membuat berbagai kebijakan serta program-program yang membantu negara anggotanya untuk mengembangkan sektor pariwisata sehingga pariwisata negara tersebut dapat berkembang secara optimal. Sebagai organisasi pariwisata dunia, UNWTO dapat menolong berbagai negara di dunia. Hal ini bertujuan agar sektor pariwisata di tiap negara khususnya Indonesia dapat bangkit kembali setelah pandemi Covid-19 melanda.

¹⁰ UNWTO, *About Us*. Diakses dari < <https://www.unwto.org/about-us>> pada tanggal 16 April 2022.

Mengingat pariwisata merupakan sektor andalan Indonesia sebagai penghasil devisa negara, maka Pemerintah Indonesia dan UNWTO telah menjalin kerja sama meliputi pelatihan, *sharing experience*, dan penanaman modal. Pemerintah Indonesia berperan aktif mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh UNWTO. Contohnya seperti duduk sebagai anggota *World Committee on Tourism Ethics* (WCTE) pada periode 2003-2007 dan 2007-2013¹¹. Selain itu, Indonesia juga terpilih sebagai anggota *Executive Council* UNWTO pada Sidang Umum UNWTO yang ke-19 di Gyeongju, Republik Korea Selatan pada tanggal 8-14 Oktober 2011. Selain itu, UNWTO juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam proyek “*Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaption and Mitigation Measures in Pangandaran*”. Proyek ini ditujukan untuk menjadi model Langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai daerah tujuan wisata di Indonesia dan Asia Tenggara.

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas tentang peran *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam membantu mengaktifkan kembali sektor pariwisata khususnya di Bali, Indonesia pada tahun 2020-2021 yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

¹¹ Kementerian Luar Negeri Indonesia. Daftar Kerja Sama Multilateral: World Tourism Organization (UN-WTO). Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/135/halaman_list_lainnya/world-tourism-organization-un-wto> pada tanggal 26 April 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana peran *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam reaktivasi pariwisata akibat Covid-19 di Bali tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional bagi khalayak umum hingga akademisi melalui sebuah karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat gelar strata 1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana bentuk peranan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya reaktivasi pariwisata akibat Covid-19 di Bali, Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan dan menggambarkan fenomena yang terjadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Umum

Manfaat umum dari penelitian ini yaitu agar dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya hubungan internasional. Lalu, penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki kaitan dengan isu-isu dalam organisasi internasional.

1.4.2 Secara Khusus

Manfaat khusus dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan peran *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam upaya reaktivasi dan mewujudkan tujuan tersebut pada level *sub-state*. Secara praktik penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dari hubungan internasional, khususnya dalam kajian pariwisata berkelanjutan dan peran organisasi internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 Peran Organisasi Internasional

Peran dari organisasi Internasional adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hubungan internasional saat ini, telah diakui keberhasilannya dalam peranannya memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Organisasi internasional dinilai dapat mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat di suatu negara secara tidak langsung. *International Organization* yang ditulis oleh Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibuat atas persetujuan antara dua negara atau lebih untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan tertentu secara bersama-sama. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional diwajibkan untuk tunduk pada peraturan yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati bersama.

J. Samuel Barkin dalam bukunya yang berjudul “*International Organization: Theories and Institutions*” menjelaskan bahwa Organisasi Internasional merupakan organisasi antar pemerintahan yang inklusif. Organisasi yang inklusif dapat diartikan sebagai organisasi yang dapat diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan.

Teuku May Rudy dalam bukunya “*Administrasi dan Organisasi Internasional*” menjelaskan bahwa peran organisasi internasional yaitu sebagai wadah atau forum yang ditujukan untuk menjalin kerja sama antar sesama anggota, sehingga upaya dapat mengurangi intensitas konflik yang dapat terjadi¹². Selain itu, Teuku juga menjabarkan lebih lanjut bahwa organisasi internasional berperan sebagai sarana perundingan. Sesama anggota akan berunding dan menghasilkan sebuah keputusan bersama yang saling menguntungkan. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri. Lembaga ini akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan lingkup kerja organisasi tersebut, antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, pariwisata, kegiatan lingkungan hidup, *peacekeeping*, dan bantuan militer.

Dalam buku *International Organization*, Clive Archer memaparkan tiga peran dari organisasi internasional. Peran pertama berisikan penjelasan bahwa organisasi internasional adalah sebagai instrumen. Hal ini biasanya terjadi pada *Intergovernmental Organization* (IGO) atau organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat. Organisasi internasional digunakan oleh para anggotanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang telah disepakati bersama sesuai dengan tujuan politik luar negeri masing-masing. Beberapa contoh dari peran organisasi sebagai instrumen seperti sarana edukasi *capacity building* dan *technical assistance*.

12 Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: Angkasa, 2009)

Peran yang kedua dari organisasi internasional yaitu sebagai arena. Para anggota dalam sebuah organisasi internasional bertemu, membahas, dan membicarakan permasalahan yang dihadapi. Beberapa negara terkadang menggunakan organisasi internasional untuk mengangkat suatu isu atau masalah penting dalam negerinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh perhatian dari dunia internasional.

Yang ketiga adalah sebagai aktor independen. Sebuah organisasi internasional dapat bertindak secara mandiri dalam membuat suatu keputusan tanpa dipengaruhi kepentingan, kekuasaan, paksaan dari luar organisasi. Tidak hanya itu, organisasi internasional juga dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat netral kepada para anggotanya tanpa ada campur tangan kepentingan dari pihak luar.

Jadi, dari penjelasan peran pertama organisasi internasional, adalah sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh para anggotanya. Hal tersebut untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu. Fenomena ini menjadi gambaran yang tepat untuk menjelaskan kegiatan dari organisasi internasional dalam upaya penerapan kebijakan konsep *capacity building* dan *technical assistance*¹³.

¹³ Uyo Salifu, *The United Nations' triadic role as International Organisation in the achievement of selected child-related Millenium Development Goals: The case of West Africa* [daring]. Diakses dari < <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30352/dissertation.pdf;jsessionid=1D681D190EFE6FB053165B508EDAA9C2?sequence=1> > pada tanggal 16 April 2022.

Pada umumnya, wujud dari peran organisasi internasional sebagai instrumen adalah dalam bentuk penyelenggaraan *training* atau *workshop*. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dengan tujuan dan tema yang dianggap penting bagi organisasi internasional. Bagi para anggota, adanya program pembangunan kapasitas dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil pilihan kebijakan yang tepat dan efektif terhadap permasalahan yang sedang di hadapi. Jadi, para anggota organisasi internasional secara aktif dapat mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan yang disediakan.

Menurut Morrison bahwa *capacity building* merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel didalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada¹⁴. Secara umum, konsep *capacity building* dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas bagi individu, kelompok, atau organisasi. *Capacity building* dapat membantu individu, kelompok, atau organisasi bertahan dan mengatasi tantangan perubahan yang cepat dan tidak terduga. *Capacity building* dapat diartikan sebagai proses kreatif dalam mengembangkan kemampuan yang ada. *Capacity building* juga dapat diartikan sebagai proses kreatif peningkatan kapasitas yang belum terlihat.

¹⁴ Tarance Morrison. *Actionable Learning -A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. (Tokyo: ADB Institute, 2001).

Pengertian lain mengenai pembangunan kapasitas juga dikemukakan oleh Katty Sensions dalam yang memberikan definisi dari *capacity building*¹⁵:

“capacity building usually is understood to mean helping government, communities and individuals to develop the skills and expertise needed to achieve their goals. capacity building program often designed to strengthen participant’s abilities to evaluated their policy choices and implement decisions effectivelly, may include education and training, institutional and legal reforms as well as scientific, technological and financial assistance”.

Dari pernyataan Katty Sensions diatas bahwa pembangunan kapasitas biasanya dipahami sebagai alat untuk membantu pemerintah, komunitas dan individu-individu dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Program pembangunan kapasitas, dapat didesain untuk memperkuat kemampuan partisipan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasi kebijakan secara efektif, termasuk pendidikan dan pelatihan, embaga dan reformasi kebijakan, begitu juga pengetahuan, tegnologi, dan membantu perekonomian).

Sedangkan Rosalyn juga mengatakan terkait definisi *capacity building*. Ia menjelaskan bahwa¹⁶:

“capacity building has been defined as both capabilities and actions to strengthen on organization’s ability to achieve its vision and to sustain itself. The end result of capacity building is improved organizational health and overall effectiveness, resulting in increased impacts and outcomes”.

Jadi, dapat dipahami bahwa pembangunan kapasitas didefinisikan sebagai gabungan dari kemampuan dan tindakan untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan untuk menopang organisasi itu sendiri. Hasil akhir dari

¹⁵ Bambang Santoso Haryono. *Capacity Building*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012).

¹⁶ *Ibid.*

pembangunan kapasitas adalah meningkatkan kesehatan organisasi dan keefektifan secara menyeluruh, yang kemudian menghasilkan hasil dan dampak.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa *capacity building* adalah proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem agar tercipta kinerja yang lebih baik dan tanggap terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan-tuntutan dari luar dan dalam sehingga organisasi perlu secara terus menerus harus menentukan sikap yang kondusif untuk menghadapi tantangan yang menggetarkan eksistensinya. Dengan demikian peningkatan kapasitas diarahkan untuk memperkokoh kemampuan adaptasinya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro.

Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam hal ini aktivitas yang

perlu dilakukan adalah melakukan perubahan “aturan main” dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani.

Adapun tujuan dari *capacity building* (pembangunan kapasitas) dapat dibagi menjadi dua yaitu secara umum dan khusus¹⁷. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem. Lalu, secara khusus berarti ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome. Yang kedua adalah efektifitas berupa kepatasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui sebelum program peningkatan kapasitas. Persyaratan tersebut antara lain partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas dan kepemimpinan¹⁸. Partisipasi merupakan salah satu syarat terpenting karena menjadi dasar dari semua rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas. Partisipasi dari semua tingkatan, tidak hanya staf atau pegawai, tetapi juga pimpinan atas, menengah dan bawah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program, sehingga inisiatif

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mohammad Said. *Pengembangan Kapasitas Organisasional Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintah*. Diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1110/pdf_1> pada tanggal 2 Juni 2022.

partisipasi ini harus dibangun dari awal hingga akhir program pengembangan kapasitas dalam rangka untuk menjamin kelangsungan program.

Inovasi juga menjadi syarat lain yang tidak kalah mendesak. Harus diakui bahwa inovasi merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas, khususnya dalam konteks memberikan berbagai alternatif dan metode peningkatan kapasitas yang variatif, dan menyenangkan. Hampir tidak mungkin mengembangkan kapasitas tanpa diikuti dengan inovasi. Hal ini karena *capacity building* adalah salah satu bentuk inovasi. Pembangunan mengabaikan, menghambat atau tidak memberikan ruang bagi inovasi. Inovasi menjadi penting karena pekerjaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Selanjutnya, akses informasi menjadi syarat lain yang tak kalah penting dalam menjalankan program peningkatan kapasitas. Dalam bentuk organisasi tradisional dan birokrasi, semua informasi dipegang dan dikendalikan oleh pimpinan. Kondisi seperti itu jelas tidak memungkinkan peningkatan kapasitas. Di sisi lain, peningkatan kapasitas harus dimulai dengan memberikan akses dan kesempatan memperoleh informasi yang cukup baik dan efektif untuk mendukung program yang akan dilaksanakan. Akuntabilitas juga merupakan syarat lain yang tidak kalah mendesak.

Akuntabilitas penting untuk menjaga bahwa program pengembangan kapasitas juga harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga mengarah pada hasil yang

diinginkan¹⁹. Dengan kata lain, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa program pengembangan kapasitas merupakan kegiatan yang sah, kredibel, akuntabel dan akuntabel. Persyaratan terakhir adalah kepemimpinan. Sebagaimana dijelaskan di atas, kepemimpinan memainkan peran penting dalam keberhasilan program peningkatan kapasitas organisasi.

Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam *capacity building* meliputi keterbukaan, penerimaan ide baru (*receptivity to new ideas*), kejujuran (*honesty*), perhatian (*caring*), respect terhadap martabat dan respect terhadap orang lain²⁰. orang lain (menghormati orang). Semakin pemimpin memberikan kepercayaan dan suasana yang kondusif bagi staf untuk berkembang, semakin sukses program peningkatan kapasitas dalam suatu organisasi.

Pengembangan kapasitas secara strategik akan mengarah pada sustainabilitas kinerja sistem. Dapat diterapkan semisal pada sistem kesehatan atau sistem pendidikan²¹. Maka untuk mencapai sustainabilitas kinerja sistem kesehatan diperlukan faktor waktu, yang dimanfaatkan oleh para personil, organisasi dan komponen-komponen sistem kesehatan untuk bekerja dengan baik. Mereka harus menunjukkan kinerja sistem yang baik, mudah diakses, bermutu, merata dan berkeadilan, serta efisien. Itu berarti semua komponen pemilik kapasitas (individu/personil, masyarakat, organisasi, institusi) harus memunculkan kinerja mereka sampai pada sustainabilitas.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Peran individu, komunitas, dan masyarakat sebagai konsumen/pengguna produk dan layanan yang diberikan oleh para personil organisasi (bagian dari sistem) adalah melakukan *demand position* dan terus mempengaruhi kapasitas personil, organisasi, dan sistem untuk meningkatkan kapasitas kinerjanya²². Mereka adalah *stakeholder* yang berhak atas bagian mereka, seperti masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan para siswa yang membutuhkan layanan pendidikan. Tak ada mereka maka sistem tidak akan mencapai sustainabilitas.

Semua *stakeholder* pengembangan kapasitas akan meningkatkan status mereka masing-masing secara sinergis dan integral²³. Pada akhirnya, seiring waktu pula status yang meningkat itu dapat menjadi indikator kinerja sistem yang sustainabel sebagai buah dari kolektifitas kinerja sistem, organisasi dan personil. Di sisi lain pula, dapat disimak adanya perubahan perilaku perorangan, komunitas dan masyarakat yang bersesuaian dengan kinerja sistem, organisasi, personil. Selain itu meningkatkan status mereka, maka seiring waktu pula, perilaku mereka yang berubah dan berindikasi *sustainable* akan berkontribusi pada sistem yang berkelanjutan.

Sementara faktor eksternal, seperti kebudayaan, politik ekonomi, aturan legal, dan lingkungan hidup akan terus mempengaruhi dinamika seluruh komponen proses pengembangan kapasitas yang sedang berlangsung dan tidak pernah berakhir itu. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan para ahli diatas maka, dalam penelitian ini

²² Ahmad Susanto. *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep, Strategi, dan Implementasinya*. Diakses dari <<https://books.google.co.id/books?id=Gh2eDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>> pada tanggal 2 Juni 2022.

²³ *Ibid.*

peneliti memilih berfokus pada salah satu dimensi *capacity building* yaitu penguatan organisasi. Alasan peneliti memfokuskan pada penguatan organisasi karena mengingat pentingnya eksistensi sebuah organisasi untuk menjalin *networking* dan memperluas pangsa pasar selain itu untuk mewujudkan UMKM yang mandiri dan berdaya saing harus diimbangi dengan kelembagaan yang kuat.

Lalu definisi dari *technical assistance* menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) adalah sebuah bantuan non-keuangan yang diberikan oleh spesialis lokal maupun internasional²⁴. Terdapat berbagai wujud dari *technical assistance*. Contohnya seperti berbagi informasi, keahlian, pelatihan keterampilan, instruksi, transmisi pengetahuan kerja, transfer data teknis, hingga menyediakan layanan konsultasi. Selain itu, UNESCO juga memaparkan mengenai tujuan dari *technical assistance*. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan kualitas implementasi dan dampak proyek dengan cara memberi dukungan manajemen, administrasi, pengembangan kebijakan, dan pengembangan kapasitas. Jadi, fokus utama dari diberikannya *technical assistance* oleh organisasi internasional berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan dan prioritas tertentu.

College of Health and Human Development menjelaskan bahwa bantuan teknis adalah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan komunikasi dan kolaborasi di seluruh sistem. Semua itu dilakukan dengan tujuan akhir guna menjembatani

²⁴ *Ibid.*

kesenjangan antara penelitian, kebijakan, dan praktik²⁵. Selain itu, menurut *World Bank* atau Bank Dunia bahwa *technical assistance* termasuk dalam instrumen utama dalam meningkatkan kebijakan dalam menangani isu tertentu²⁶. *Technical assistance* juga bermanfaat dalam membantu meningkatkan keterampilan dan memperkuat kapasitas implementasi dan berdampak pada pengembangan kelembagaan secara umum.

UNWTO juga memberikan penjabaran terkait definisi dan bentuk dari *technical assistance*. Dalam upaya untuk membantu negara-negara anggota dalam mengembangkan pendekatan bertahap untuk pemulihan pariwisata global, UNWTO telah merancang “*COVID-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package*”²⁷. Dari paket ini, UNWTO menjelaskan *technical assistance* dapat berupa penawaran bimbingan untuk publik dan swasta serta pemangku kepentingan di sektor pariwisata ketika dilanda krisis. UNWTO dalam *COVID-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package* menjabarkan bahwa *technical assistance* terbentuk dari tiga pilar utama yaitu *economic recovery, marketing and promotion, institutional strengthening and building resilience*.

²⁵PennState. *What are example of technical assistance?*. Diakses dari <<https://www.episcenter.psu.edu/technical-assistance>> pada tanggal 25 Mei 2022.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ UNWTO. *UNWTO Releases a Covid-19 Technical Assistance Package For Tourism Recovery*. Diakses dari <<https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery>> pada tanggal 2 Juni 2022.

Economic recovery atau pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui pengukuran dampak secara kuantitatif dan kualitatif dari Covid-19 pada sektor pariwisata dan menyiapkan rekomendasi berbasis penelitian untuk pemulihan ekonomi dan dukungan untuk bisnis terkait pariwisata, khususnya untuk UMKM. Lalu, pemasaran dan promosi dapat dilakukan melalui review pemasaran dan promosi, mengidentifikasi dan menargetkan pasar yang dapat membantu mempercepat pemulihan, menangani diversifikasi produk, dan rekomendasi dan pedoman dalam hal dari harga dan kemasan. Yang ketiga adalah penguatan kelembagaan dan membangun ketahanan. Dalam hal ini ditujukan untuk membantu pemerintah pariwisata dan bisnis pariwisata untuk menyesuaikan layanan mereka dalam memenuhi kondisi kerja pasca Covid-19 di aspek kesehatan, keselamatan, dan pemulihan kepercayaan konsumen dan mempromosikan pariwisata pemerintahan, kemitraan publik-swasta dan upaya kolaboratif untuk pemulihan pariwisata, termasuk kesiapsiagaan krisis dan sistem manajemen, protokol dan keterampilan.

Di samping bantuan teknis, dukungan dari UNWTO dalam kegiatan bantuan teknis ditujukan untuk mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi seperti pengukuran dampak Covid-19, rencana pemulihan pariwisata khusus negara, program pendukung umkm pariwisata, reorientasi rantai nilai pariwisata menuju keberlanjutan²⁸.

²⁸ *Ibid.*

Jadi, kedua konsep tersebut dapat saling berhubungan dan menunjang upaya suatu organisasi internasional dalam mencapai tujuannya. Organisasi internasional menyelenggarakan program *capacity building* yang dapat diikuti oleh para anggotanya yang berperan sebagai *mastermind*. Dengan begitu, bantuan yang organisasi internasional berikan tidak salah sasaran dan tepat guna sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Setelah itu, *technical assistance* bertujuan untuk mengimplementasikan informasi atau pengetahuan yang diperoleh dari *capacity building* di lapangan secara langsung.

1.5.1.2 Pariwisata

Pariwisata yang saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Fandeli bahwa pariwisata adalah segala apapun yang ada kaitannya dengan wisata, termasuk pengusaha objek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan bidang tersebut. Pariwisata juga meliputi kegiatan bepergian dari suatu tempat menuju tempat tujuan lain yang lokasinya berada di luar tempat tinggalnya, dengan tujuan tidak untuk mencari nafkah, tetapi untuk menciptakan kembali kesegaran baik fisik maupun psikis supaya dapat berprestasi lagi.

Lalu, menurut Pendit bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang kompleks. Maksud dari kompleks adalah bahwa adanya keterlibatan dari industri-industri lain yang ikut menunjang sektor tersebut. Beberapa contoh dari industri-industri lain yang juga

ikut dilibatkan meliputi cinderamata dan kerajinan tangan, serta usaha-usaha restoran, penginapan, dan transportasi.

James J. Spillane memaparkan pendapatnya bahwa pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang menempuh perjalanan. Tujuannya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, mengetahui sesuatu, istirahat, olahraga, menjalankan tugas, berobat untuk kesehatan, dan lain sebagainya²⁹. James juga menjelaskan bahwa dalam artian luas, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan bersifat hanya sementara dan dapat dilakukan individu maupun kelompok. Hal ini sebagai bentuk usaha memperoleh keseimbangan atau keserasian dan kesenangan dengan lingkungan hidup di berbagai dimensi seperti sosial, budaya, alam, dan ilmu. Ada tiga syarat agar suatu perjalanan dapat dianggap sebagai perjalanan wisata. Ketiga syarat ini meliputi bersifat sementara, bersifat sukarela atau tanpa paksaan, dan tidak bekerja. Pada syarat ketiga, tidak bekerja yang dimaksud adalah yang sifatnya tidak menghasilkan upah atau gaji.

Cooper et al. mendefinisikan pariwisata sebagai “rangkaiian kegiatan berupa perjalanan sementara ke tempat tujuan tertentu di luar rumah atau tempat kerja, tinggal sementara di tempat tujuan dan menikmati fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan”. Terdapat berbagai definisi pariwisata dengan berbagai perspektif yang seringkali tumpang tindih sehingga menimbulkan kerancuan makna yang membingungkan bagi upaya pengelolaannya

²⁹ Spillane, *Op. Cit.*

Menurut Hunziker dan Kraft mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Sehingga dalam melakukan perjalanannya tersebut hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Lalu, menurut Robert McIntosh dan Shashikant Gupta dalam Pendit, pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya.

Menurut James J. Spillane dalam sektor industri pariwisata terdapat lima unsur. Lima unsur ini sangat penting dan mempengaruhi bagaimana berlangsungnya sektor pariwisata itu. Unsur yang pertama yaitu *attractions* (daya tarik)³⁰. *Attractions* dapat dibedakan lagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah *site attraction*. *Site attraction* merupakan sebuah daya tarik secara fisik dan permanen dengan lokasi. Contohnya seperti keraton, museum, dan kebun binatang. Tipe yang kedua adalah *event attractions*. *Event attractions* adalah daya tarik yang sifatnya sementara dan lokasi pariwisatanya dapat berubah dengan mudah. Contohnya seperti pameran, festival, dan seni pertunjukan daerah.

Unsur yang kedua yaitu *facilities* atau berbagai fasilitas yang diperlukan. Fasilitas dalam sektor pariwisata menjadi penting di suatu lokasi. Hal ini berkaitan

³⁰ Spillane, *Op. Cit.*

dengan lokasi fasilitas harus berada sesuai dengan pasarnya³¹. Contohnya wisatawan yang menginap atau selama tinggal di tempat tujuan pariwisata, tentunya wisatawan memerlukan tempat untuk tidur, makan dan minum. Maka dari itu, fasilitas seperti penginapan sangat dibutuhkan. beberapa fasilitas lainnya dapat berupa toko *souvenir*, *laundry*, tempat rekreasi, dan pemandu wisata.

Unsur yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar diperlukan guna mendorong perkembangan sektor pariwisata³². Adanya infrastruktur di suatu daerah dapat dinikmati oleh wisatawan dan masyarakat setempat. Dengan kata lain, penduduk lokal juga akan memperoleh keuntungan. Pembangunan infrastruktur yang layak dan memadai akan menjadi cara untuk mewujudkan suasana yang cocok dan sesuai untuk perkembangan sektor pariwisata.

Unsur yang keempat adalah transportasi. Kemajuan dunia transportasi dalam sektor pariwisata sangat penting³³. Transportasi dibutuhkan karena dapat mempengaruhi jarak dan waktu seorang wisatawan dalam menempuh perjalanan wisata. Transportasi darat, laut dan udara dapat mempengaruhi unsur yang secara langsung memberikan dampak pada tahapan dinamis gejala-gejala pariwisata.

Unsur yang kelima adalah *hospitality* atau keramahtamahan. *Hospitality* yang dimiliki oleh tenaga kerja wisata juga dianggap sangat penting³⁴. wisatawan asing yang

³¹ Spillane, *Op. Cit.*

³² Spillane, *Op. Cit.*

³³ Spillane, *Op. Cit.*

³⁴ Spillane, *Op. Cit.*

berada di lingkungan baru dan tidak mereka kenal tentunya memerlukan *hospitality* agar mereka dapat merasa aman dan nyaman selama melakukan perjalanan wisata.

Selain itu, menurut Oka. A. Yoeti hal pendukung lainnya dalam berkembangnya sektor pariwisata ialah publikasi atau promosi³⁵. Bentuk dari promosi dapat berupa pemasangan iklan dan penyebaran brosur kepada calon wisatawan. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui tiap paket pariwisata dan mempercepat wisatawan untuk memutuskan berkunjung di wilayahnya. Upaya ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga organisasi pariwisata internasional. Upaya promosi ini juga merupakan salah satu wujud dari *technical assistance*.

Pemerintah Indonesia juga merumuskan beberapa unsur pendukung dalam mendorong perkembangnya sektor pariwisata. Dalam menciptakan kondisi dan kualitas pariwisata yang lebih baik maka diwujudkan melalui pendoman wisata Indonesia dengan sebutan “Sapta Pesona Wisata”³⁶. Tujuan dari program Sapta Pesona Wisata adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bergerak bersama menuju pariwisata Indonesia yang lebih baik. Terdapat tujuh unsur dalam Sapta Pesona Wisata yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Pada umumnya, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional dalam memberikan program *capacity building* kepada pelaku pariwisata, dinas pariwisata setempat, dan pelaku ekonomi

³⁵ Oka A. Yoeti. *Perencanaan dan Perkembangan Pariwisata*. (Jakarta: PT. Pradyanta Paramita, 1997).

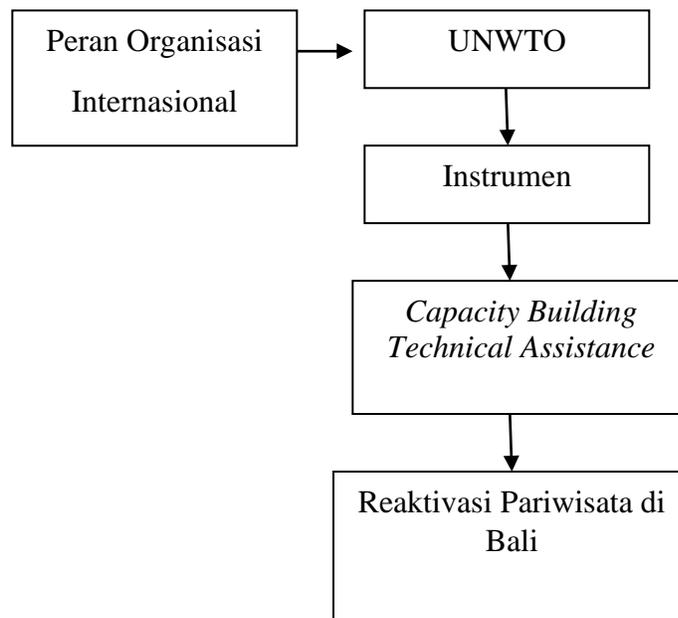
³⁶ Kanal Wisata Indonesia. *Sapta Pesona Wisata Indonesia*. Diakses dari <<https://kanalwisata.com/sapta-pesona-wisata-indonesia>> pada tanggal 5 Mei 2022.

kreatif. Dengan begitu seluruh elemen dapat bekerja sama mewujudkan sektor pariwisata yang lebih maju.

Dari kedua teori diatas dapat dipahami bahwa organisasi internasional berpengaruh dalam dinamika pariwisata di dunia. Pemerintah Indonesia menjalankan tugasnya dibantu oleh organisasi internasional UNWTO dalam upaya reaktivasi pariwisata di Bali. UNWTO merupakan sebuah organisasi internasional yang turut membantu pemerintah Indonesia dalam reaktivasi pariwisata yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 di Bali pada tahun 2020-2021.

1.5.1.3 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Elaborasi Penulis

Dari sintesa pemikiran diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa UNWTO yang merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang pariwisata memiliki komitmen dalam upaya reaktivasi pariwisata akibat dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. UNWTO menjalin kerja sama dan membantu negara anggotanya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait sektor pariwisata. Dalam hal ini, UNWTO berperan sebagai instrumen. Organisasi tersebut bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu Bali dalam upaya reaktivasi sebagai destinasi wisata kembali. Peran dari UNWTO sebagai instrumen diwujudkan dalam dua aspek yaitu *capacity building* dan *technical assistance*.

1.6 Argumen Utama

Dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peran UNWTO dalam upaya reaktivasi sektor pariwisata di Bali, Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021 ialah sebagai instrumen. UNWTO berperan dengan memberikan *capacity building* dan *technical assistance*. Dalam hal *capacity building*, UNWTO menyelenggarakan *training* dan *workshop*. Lalu, UNWTO memberikan *technical assistance* dalam bentuk *marketing* dan *promotion*.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait realita yang penulis temukan dan dijabarkan dalam bentuk naratif. Hal tersebut turut dijelaskan oleh Notoatmodjo bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang suatu kondisi tertentu secara objektif³⁷.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan data, analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan. Jenis penelitian ini juga berusaha untuk memperoleh dan menjelaskan fakta-fakta secara jelas, teliti, dan lengkap. Kemudian, Prof. Dr. Sugiyono juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif menyajikan data secara detail dan rinci terhadap suatu fenomena tertentu³⁸.

Lalu, Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan terkait pengertian dari penelitian kualitatif (*qualitative research*)³⁹. Ia menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, pemikiran individu atau kelompok. Pendekatan dalam penelitian

³⁷ Notoatmodjo. *Metode Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

kualitatif yaitu pendekatan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara menyeluruh. Jadi, dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan segala macam upaya yang dilakukan oleh UNWTO sebagai organisasi internasional yang melakukan reaktivasi pariwisata akibat dampak Covid-19 di Bali, Indonesia.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu. Hal ini bertujuan agar penelitian tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasan. Maka jangkauan pada penelitian ini memiliki rentang waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Alasan dimulai dari 2020 adalah karena berkaitan dengan awal mula dampak pandemi covid-19 terjadi dan menimpa Bali. Sedangkan tahun 2021 dipilih sebagai tahun dimana UNWTO memilih Bali menjadi tuan rumah untuk acara tahunan *World Tourism Day* 2022. Hal tersebut menunjukkan prioritas UNWTO memilih Bali dalam upaya reaktivasi pariwisata dan juga turut mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata andalan di mata dunia.

Selain itu, penulis juga memberikan batasan lingkup penelitian yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Lingkup dari penelitian adalah pada upaya-upaya yang dilakukan oleh UNWTO dalam membantu Bali reaktivasi sektor pariwisatanya akibat dari Covid-19. Dengan begitu, dari penelitian ini akan mendapatkan pemahaman mengenai peranan UNWTO.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Menurut Burhan Bungin bahwa penelitian sosial dapat dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data penelitian. Hal ini meliputi wawancara, analisis *life history*, pengamatan, dan lain sebagainya⁴⁰. Lalu, menurut Bagong Suyanto & Sutinah dalam buku *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* menjelaskan bahwa terdapat tiga macam teknik pengumpulan data secara kualitatif. Tiga macam teknik tersebut meliputi wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, dan yang terakhir adalah penelaahan terhadap dokumen tertulis⁴¹.

Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Telaah pustaka digunakan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan isu dan masalah yang dibahas pada penelitian ini, dan kemudian dianalisis. Literatur disini berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, situs-situs internet, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan peranan UNWTO.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari hasil pengamatan oleh pihak lain. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan artikel-artikel, berita dan dokumen laporan resmi Pemerintah Indonesia dan UNWTO yang ada di internet.

⁴⁰ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

⁴¹ Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Lalu, penulis kemudian merangkumnya menjadi satu. Dengan begitu, penulis mendapatkan data yang untuk dilaporkan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data, terdapat dua metode analisis yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis kuantitatif menggunakan statistik sebagai alat analisis datanya. Tahapan dalam menganalisis data kuantitatif meliputi pengolahan data sebagai kegiatan awal. Kegiatan awal ini mencakup beberapa tahapan. Tahapan-tahapannya yaitu *coding*, *editing*, penyederhanaan data, dan mengkode data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah sebuah teknik menganalisis permasalahan, kemudian memberikan gambaran dan menyajikannya. Penjelasan yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Lalu, menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya dengan begitu dapat menghasilkan sebuah argumen yang tepat dan kredibel.

Prof. Dr. Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari tahapan awal penelitian. Tahapan awal yang dimaksud adalah ketika akan masuk ke lapangan hingga selesai di lapangan⁴². Metode ini digunakan ketika data empiris yang dipakai merupakan sebuah data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian dalam bentuk kata-kata dan datanya tidak dapat dikategorikan.

⁴² *Ibid.*

Lalu, Miles & Huberman juga memaparkan bahwa teknik analisis data terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*⁴³. Dengan begitu data yang telah diperoleh dan terkumpul akan melalui proses reduksi. Selanjutnya dapat disajikan serta disimpulkan atau diverifikasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data-data diperoleh, data tersebut akan dianalisis. Selanjutnya, data juga akan dipilih, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab dan membuktikan argumen utama.

⁴³ B. Mathew Miles & Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran atau landasan pemikiran yang berkaitan dengan landasan teori dan sintesa pemikiran, serta dilengkapi dengan argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Gambaran umum tentang UNWTO sebagai organisasi internasional yang bergerak di sektor pariwisata dunia.
3. Bab III : Penjelasan peran UNWTO sebagai instrumen dalam bentuk *capacity building* dan *technical assistance* dalam upaya reaktivasi sektor pariwisata di Bali, Indonesia.
4. Bab IV : Penutup berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan analisis peran UNWTO berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN